Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 181 Tahun 2015
Tanggal 29 Mei 2015

URAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2016

A. DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **x**

ABSTRAKSI RKPD 2016 ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **I.1**

1.1 Latar Belakang I.1
1.2 Tahapan Penyusunan RKPD. I.4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan I.7
1.4 Hubungan Antar Dokumen I.8
1.4.1 RKPD dan RKP Tahun 2016 ..... I.9
1.4.2 RKPD dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017 ..... I.10
1.4.3 RKPD, dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD, dan KUA PPAS I.11
1.5 Maksud dan Tujuan I.12
1.6 Sistematika Dokumen RKPD I.13

BAB 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN **II.1**

2.1 Gambaran Umum Kondisi Provinsi DKI Jakarta II.2
2.1.1 Sejarah Kota Jakarta II.2
2.1.2 Otonomi Daerah di Provinsi DKI Jakarta II.3
2.2 Aspek Geografi, Geologi, Klimatologi dan Demografi II.5
2.2.1 Kondisi Geografi dan Topografi II.5
2.2.2 Geologi II.7
2.2.3 Klimatologi II.11
2.2.4 Kondisi Demografis II.12
2.2.4.1 Perkembangan Penduduk II.12
2.2.4.2 Struktur Penduduk II.13
2.2.4.3 Perkembangan Komuter Jabodetabek II.13
2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II.16
2.3.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II.16
2.3.2 Kesenjangan dan Kemiskinan II.18
2.3.3 Kesejahteraan Sosial II.20
2.3.4 Seni Budaya dan Olah Raga II.24
2.4 Aspek Pelayanan Umum II.25
2.4.1 Pendidikan II.25
2.4.2 Kesehatan II.27
2.4.3 Pekerjaan Umum II.28

2.4.4 Perumahan Rakyat II.29
2.4.5 Penataan Ruang..... II.29
2.4.6 Perhubungan..... II.30
2.4.7 Lingkungan Hidup..... II.31
2.4.8 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera..... II.31
2.4.9 Ketenagakerjaan..... II.32
2.4.10 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah..... II.33
2.4.11 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian II.33
2.4.12 Perdagangan..... II.34
2.4.13 Energi Dan Sumber Daya Mineral..... II.35
2.4.14 Pariwisata..... II.35
2.4.15 Kelautan Dan Perikanan..... II.36
2.4.16 Perindustrian..... II.36
2.5 Aspek Daya Saing Daerah..... II.36
2.5.1 Kemampuan ekonomi makro..... II.37
2.5.2 Kemampuan Keuangan daerah..... II.37
2.5.3 Fasilitas Infrastruktur..... II.38
2.5.4 Iklim Investasi..... II.38
2.5.5 Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia..... II.39
2.5.6 Lingkungan Strategi Nasional, Regional, dan Global..... II.39
2.6 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2014..... II.40
2.7 Isu Strategis dan Permasalahan Daerah..... II.45
2.7.1 Sistem Transportasi dan Permasalahannya..... II.45
2.7.2 Banjir dan Genangan..... II.47
2.7.3 Perumahan dan Permukiman..... II.48
2.7.4 Ruang Terbuka Hijau (RTH)..... II.49
2.7.5 Kemiskinan Kota..... II.50
2.7.6 Reformasi Birokrasi..... II.50
2.7.7 Pembangunan Pendidikan..... II.51
2.7.8 Kesehatan Masyarakat..... II.52
2.7.9 Penataan Ruang..... II.52
2.7.10 Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat..... II.52
2.7.11 Perubahan Iklim..... II.53
2.7.12 Pencemaran Lingkungan..... II.53
2.7.13 Pengelolaan Air Bersih..... II.54
2.7.14 Ketahanan Pangan..... II.55
2.7.15 Ketahanan Energi Listrik dan Gas..... II.55
2.7.16 Stabilitas Ekonomi..... II.56
2.7.17 Iklim Investasi..... II.56
2.7.18 Perdagangan dan Jasa..... II.57
2.7.19 Keuangan Daerah..... II.57
2.7.20 Kerjasama Antar Daerah di Jabodetabekjur..... II.58

BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III.1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III.1
3.1.1 Proyeksi Perekonomian Global..... III.2
3.1.2 Proyeksi Perekonomian Nasional..... III.3
3.1.3 Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014 dan Proyeksi Tahun 2015..... III.4
3.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta..... III.7

3.1.5 Inflasi Jakarta..... III.11
3.1.6 Nilai Tukar..... III.12
3.1.7 Proyeksi Perekonomian Provinsi DKI Jakarta..... III.13
3.1.7.1 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta..... III.14
3.1.7.2 Inflasi Jakarta..... III.15
3.1.7.3 Nilai Tukar..... III.16

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III.18
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan..... III.18
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III.21
3.2.2.1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..... III.21
3.2.2.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah..... III.23
3.2.2.3 Kebijakan Dana Perimbangan..... III.23
3.2.2.4 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah..... III.23
3.2.2.5 Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah..... III.23
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah..... III.24
3.2.3.1 Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib III.25
3.2.3.2 Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi Dan Misi RPJMD..... III.25
3.2.3.3 Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)..... III.26
3.2.3.4 Kebijakan terkait belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006)..... III.26
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah..... III.28
3.2.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah..... III.28
3.2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah..... III.28

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV.2
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional..... IV.2
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016..... IV.3
4.1.2.1 Prioritas Program Pembangunan Daerah..... IV.17
4.2 Prioritas dan Pembangunan Daerah Tahun 2016..... IV.33
4.2.1 Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah..... IV.33
4.2.1.1 Isu Pengembangan Sistem Transportasi..... IV.33
4.2.1.2 Isu Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan..... IV.33
4.2.1.3 Isu Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kota..... IV.33
4.2.1.4 Isu Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.... IV.34
4.2.1.5 Isu Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)..... IV.34
4.2.1.6 Isu Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja..... IV.34
4.2.1.7 Isu Pembangunan Budaya Multi-Kultur..... IV.34
4.2.1.8 Isu Peningkatan Pelayanan Publik..... IV.34
4.2.1.9 Isu Peningkatan Kualitas Pendidikan..... IV.35

4.2.1.10 Isu Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat…… IV.35
4.2.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016…… IV.35
4.2.3 Arah Kebijakan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 IV.36
4.3 Prioritas Pembangunan Wilayah Tahun 2016…….…….. IV.38
4.3.1 Prioritas Pembangunan Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu…… IV.38
4.3.2 Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan……. IV.39
4.3.3 Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur……. IV.40
4.3.4 Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat……. IV.41
4.3.5 Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat…….... IV.41
4.3.6 Prioritas Pembangunan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara……. IV.42
4.4 Keselarasan Prioritas Nasional dengan Program Unggulan dan Proritas Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016…….…….. IV.43

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH **V.1**
5.1 Pendekatan Teknokratik..... V.1
5.2 Pendekatan Partisipatif dan *botttom up – top down*..... V.2
5.2.1 Rencana Kerja 2016 Hasil Rembuk RW..... V.2
5.2.1.1 Hasil Musrenbang Kelurahan yang diakomodir dalam Rencana Kerja Kelurahan……. V.2
5.2.1.2 Hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam Rencana Kerja Kecamatan…… V.3
5.2.1.3 Hasil Musrenbang Kota/Kabupaten yang diakomodir dalam Rencana Kerja Kota/Kabupaten…… V.4
5.2.1.4 Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Rencana Kerja SKPD Provinsi……. V.4
5.3 Pendekatan Politik V.6
5.3.1 Hasil Reses DPRD dan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2014..... V.6

BAB VI PENUTUP **VI.1**